



## LAPORAN SINGKAT

### KOMISI VI DPR RI

#### **BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI**

---

Rapat ke	:	3 ( <i>tiga</i> )
Tahun Sidang	:	2020-2021
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Badan Standardisasi Nasional, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Hari, Tanggal	:	Selasa, 19 Januari 2021
Pukul	:	10.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pembahasan mengenai: 1. Pelaksanaan Kegiatan dan Realisasi Anggaran TA 2020, dan 2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran TA 2021.
Hadir	:	1. .... orang dari 53 Orang Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Kepala Badan Standardisasi Nasional, Kukuh S. Achmad; 3. Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Guntur Syahputra Saragih; 4. Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Muhammad Rudi; dan 5. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Iskandar Zulkarnain, beserta jajaran.

#### **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Penguasaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan Badan Penguasaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) pada pukul 10.20 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Selasa, 19 Januari 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima.

## II. KESIMPULAN RAPAT

### A. BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Badan Standardisasi Nasional sebesar **Rp245.297.832.349** (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) atau **99,37%** dari pagu anggaran Badan Standardisasi Nasional T.A. 2020 sebesar Rp246.863.909.000 (*Dua Ratus Empat Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Rupiah*) dan mendorong Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk meningkatkan kinerjanya agar anggaran pada tahun berikutnya dapat terserap dengan maksimal.
2. Komisi VI DPR RI menerima Pagu Anggaran Badan Standardisasi Nasional Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan S-30/MK.02/2021 tentang *refocusing* dan realokasi anggaran untuk melakukan penghematan/realokasi anggaran sebesar Rp37.192.199.000 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) atau sebesar 14%, sehingga Pagu Anggaran Badan Standardisasi Nasional Tahun Anggaran 2021 menjadi sebesar **Rp228.803.934.000,-** (*Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*).
3. Komisi VI DPR RI meminta kepada Badan Standardisasi Nasional untuk meningkatkan kualitas UMKM dengan cara mengedukasi para UMKM untuk melakukan standardisasi produk sehingga bisa menjamin kualitas produk, meningkatkan daya saing produk yang dijual dan meningkatkan produk bagi konsumen.

### B. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) terkait realisasi anggaran sebesar **Rp1.693.496.603.568** (*Satu Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) atau **77,04%** dari pagu anggaran BP Batam T.A. 2020 sebesar Rp2.198.101.902.000 (*Dua Triliun Seratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Seratus Satu Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri dari :
  - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp774.457.913.383 (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*) atau 76,71% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.009.564.608.000 (*Satu Triliun Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah*).
  - b. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB Batam sebesar Rp919.038.690.185. (*Sembilan Ratus Sembilan Belas Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) atau 77,33% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.188.537.294.000 (*Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*) dan

mendorong Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) untuk meningkatkan kinerjanya agar anggaran pada tahun berikutnya dapat terserap dengan maksimal.

2. Komisi VI DPR RI menerima penggunaan Anggaran Tahun 2021 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sebesar Rp2.014.200.000.000 (*Dua Triliun Empat Belas Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*) untuk :
  - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp816.738.405.000 (*Delapan Ratus Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah*).
  - b. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp1.197.461.595.000 (*Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).

### **C. BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS)**

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) terkait realisasi anggaran sebesar Rp71.730.783.000 (*Tujuh Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*) atau 65,12% dari pagu Anggaran BPKS T.A. 2020 sebesar **Rp110.143.715.000** (*Seratus Sepuluh Miliar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri dari:
  - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp36.205.211.000 (*Tiga Puluh Enam Miliar Dua Ratus Lima Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah*) atau 81,76%.
  - b. Program Perencanaan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang Rp35.525.572.000,- (*Tiga Puluh Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*) atau 53,94%.

Selanjutnya Komisi VI DPR RI mendorong Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) untuk dapat meningkatkan kinerjanya agar anggaran pada tahun berikutnya dapat terserap dengan maksimal.

2. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) terkait pagu anggaran T.A. 2021 sebesar Rp94.978.297.000,- (*Sembilan Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp40.717.990.000,- (*Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
  - b. Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp54.260.307.000 (*Lima Puluh Empat Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Rupiah*).

Selanjutnya Komisi VI DPR RI mendorong Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) untuk meningkatkan kinerjanya agar anggaran pada tahun berikutnya dapat terserap dengan maksimal.

#### D. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait realisasi anggaran sebesar Rp113.294.248.713 (*Seratus Tiga Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah*) atau sebesar 99,33% dari pagu anggaran KPPU T.A. 2020 sebesar Rp114.053.530.000 (*Seratus Empat Belas Miliar Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI menerima Pagu Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan S-30/MK.02/2021 tentang *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga T.A. 2021 untuk melakukan penghematan/realokasi anggaran sebesar Rp22.843.718.000 (*Dua Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*) dari Pagu Anggaran sebesar Rp118.485.015.000 (*Seratus Delapan Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Belas Ribu Rupiah*) sehingga Pagu Anggaran Komisi Pengas Persaingan Usaha Tahun Anggaran 2021 menjadi sebesar **Rp95.641.297.000** (*Sembilan Puluh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

#### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.30 WIB.

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,

TTD.

ARIA BIMA  
A-189